



DINAS PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN DESA,  
KEPENDUDUKAN DAN  
CATATAN SIPIL

 KOLABORASI  
SUMUT BERKAH

# RENJA 2026

Dokumen Rencana Kerja Dinas  
PMD Dukcapil Tahun 2026

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahNya sehingga penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 ini didasarkan atas pelaksanaan kegiatan yang mengarah pada program dan kegiatan yang tertuang pada Rencana Strategi (RENSTRA) Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029.

Demikian Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 yang dapat kami persembahkan, dengan harapan pelaksanaan program/kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara lebih terarah dan terukur.

Akhirnya dengan memohon petunjuk dan bimbingan dari Allah SWT semoga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara dapat melaksanakan tugas dan pengabdian dengan sebaik-baiknya serta mampu meningkatkan prestasi kerja.

Medan, 23 Mei 2025

KEPALA DINAS

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,  
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL  
PROVINSI SUMATERA UTARA



H. PARLINDUNGAN PANE, SH, M.Si  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP.19701011 199803 1 002

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	3
1.3 Maksud dan Tujuan .....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU ....	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu & Capaian Renstra Perangkat Daerah ...	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	16
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas & Fungsi Perangkat Daerah.....	21
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	21
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	41
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .....	44
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	44
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah .....	45
3.3 Program & Kegiatan .....	47
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....	66
BAB V PENUTUP .....	74

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*). Penyusunan perencanaan pembangunan ini merupakan awal dari proses siklus pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan secara berkesinambungan. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- 2) Perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah;
- 3) Perencanaan pembangunan daerah dilakukan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
- 4) Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah;
- 5) Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional;
- 6) Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, berkeadilan, dan berkelanjutan; dan
- 7) Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan dengan spesifik (*specific*), terukur (*measurable*), dapat dilaksanakan (*achievable*), memperhatikan ketersediaan sumber daya (*resources availability*) dan memperhatikan fungsi waktu (*times*), yang disingkat SMART. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, rencana kerja perangkat daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berpedoman kepada rencana strategis (renstra) perangkat daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam rangka penyusunan renja perangkat daerah, perangkat daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan.

Renja perangkat daerah disusun dengan tahapan:

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan awal;
- c. Penyusunan rancangan
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. Perumusan rancangan akhir; dan
- f. Penetapan.

Penyusunan RKPD diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan yang terencana, sistematis dan tanggap terhadap perubahan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) memuat kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Penyusunan RKPD Tahun 2024 ini, mengacu pada Pasal 16 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang mengamanatkan bahwa RKPD disusun dengan tahapan yaitu: persiapan penyusunan RKPD, penyusunan rancangan awal RKPD, penyusunan rancangan RKPD, pelaksanaan Musrenbang RKPD, perumusan rancangan akhir RKPD, dan penetapan RKPD.

Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 ini selaras dengan isu-isu strategis yang berkembang di masyarakat serta berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pembangunan di bidang administrasi kependudukan bertujuan untuk membangun kualitas *database* kependudukan guna menjamin legalitas dokumen kependudukan. *Database* kependudukan yang berkualitas dijadikan sebagai dasar dalam perumusan berbagai kebijakan dan program pembangunan sehingga kegiatannya lebih tepat sasaran dan mampu menjembatani pemenuhan prioritas kebutuhan riil masyarakat serta sebagai sebuah dokumen resmi RKPD, dan Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dengan tujuan membentuk pemerintah desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka serta bertanggung jawab meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat kesejahteraan umum. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga

masyarakat guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan budaya sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional. Memajukan perekonomian warga masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada perangkat daerah sebagai implementasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah yang bersinergi dan menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan di dalam Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025-2029.

Rencana Kerja (Renja) OPD merupakan sebagai dokumen Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) OPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Daerah;
12. Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022;
16. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2023;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037;
18. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara tahun 2023;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12);
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023;
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
22. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Provinsi Sumatera Utara;
23. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
24. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

25. Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara Nomor ..... Tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1. Maksud**

Penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 memiliki maksud untuk menyusun dokumen perencanaan Perangkat Daerah periode 1 (satu) tahun sebagai target untuk implementasi, pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah.

#### **b. Tujuan**

Tujuan disusun Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026, sebagai pedoman:

- 1) Pelaksanaan pelayanan Perangkat Daerah;
- 2) Pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan;
- 3) Penyusunan rencana anggaran Perangkat Daerah.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara tahun 2026 disusun berdasarkan sistematika lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Renja ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Bab ini berisi tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

#### **BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

Bab ini menjabarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan hasil pelaksanaan sampai dengan tahun 2025.

#### **BAB III : TUJUAN & SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini menelaah arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara, perumusan Tujuan dan Sasaran didasarkan atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 untuk mewujudkan visi Presiden periode 2025-2029, yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”.

#### BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi tentang garis besar rencana program, prioritas, dan pendanaan Perangkat Daerah dalam Renja Tahun 2026.

#### BAB V : PENUTUP

Bab ini dijelaskan kesimpulan dari penyusunan dokumen Renja Tahun 2026. Berisi uraian catatan penting yang perlu diperhatikan, pelaksanaan, dan langkah-langkah dalam menjamin keberhasilan implementasi Renja 2026

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu & Capaian Renstra Perangkat Daerah**

##### **1) Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa provinsi Sumatera Utara dalam menjalankan tugas dan fungsi, mengalami beberapa permasalahan yang telah dievaluasi yaitu:

- Masih kurangnya pemahaman akan pentingnya penggunaan *database* oleh aparatatur pemerintah desa salah satunya data yang bersal dari penginputan profil desa yang pendayagunaanya untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa yang baik dan berkualitas dalam sistem perencanaan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
- Mendorong pemerintah desa untuk lebih memahami pentingnya keberdayaan ekonomi perdesaan melalui pengalokasian dana pengembangan perekonomian dan peningkatan kapasitas di APBDES masing-masing sesuai dengan kebutuhannya.
- Masih kurangnya pemahaman akan nilai integritas dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab dalam mengelola pemerintahan desa.
- Terbatasnya sumber daya manusia yang mampu untuk membuat laporan keuangan Bumdes, sehingga data yang diterima oleh Dinas PMD Provsu adalah data yang kurang akurat. - Sumber daya penganggaran yang secara kuantitas belum memadai serta keterbatasan sumber daya manusia

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisa kinerja tahun sebelumnya yang telah diuraikan, dapat disimpulkan saran untuk dituangkan dalam dokumen Renja Tahun 2026 ini yaitu :

1. Pelaksanaan pembinaan yang berkesinambungan serta koordinasi yang melibatkan semua pihak baik seluruh OPD bersama perangkatperangkat daerah sebagaimana kewenangannya masing-masing.
2. Konsisten berkoordinasi dan merekapitulasi pendistribusian data baik dengan pemerintah desa, kecamatan, pendamping desa dan pendamping lokal desa terhadap pemutakhiran data berkaitan dengan desa,
3. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM pengelola pemberdayaan dan pemerintahan desa

4. Pengajuan kesesuaian pada prioritas plafon anggaran pada kegiatankegiatan yang sesuai dengan hasil pemetaan masalah dan kebutuhan desa sehingga dapat lebih optimal dalam peningkatan kapasitas bagi para pengelola/ perangkat pemberdayaan dan pemerintahan desa.
5. Pengoptimalan kegiatan evaluasi dan pengendalian secara berkala serta pengawasan yang berkesinambungan sehingga dalam pelaksanaan program/kegiatan ditahun anggaran yang akan datang ketika muncul kendala dan hambatan dapat teridentifikasi kemudian secepatnya dicarikan solusi-solusi pemecahannya.
6. Terkait dengan capaian Desa Mandiri, diharapkan dukungan stakeholder maupun OPD lain, karena dalam pelaksanaannya terdapat indikator – indikator yang harus dipenuhi yang merupakan wewenang instansi lain.

Perlu optimalisasi kegiatan evaluasi dan pengendalian secara berkala serta pengawasan yang berkesinambungan sehingga dalam pelaksanaan program/kegiatan ditahun anggaran yang akan datang ketika muncul kendala dan hambatan dapat teridentifikasi kemudian secepatnya dicarikan solusi-solusi pemecahannya. Terkait dengan capaian Desa Mandiri, diharapkan dukungan stakeholder maupun OPD lain, karena dalam pelaksanaannya terdapat indikator – indikator yang harus dipenuhi yang merupakan wewenang instansi lain.

Selanjutnya, dari hasil evaluasi dan analisa terhadap hasil kinerja tahun sebelumnya dapat ditentukan langkah dan strategi yang dapat ditempuh atas evaluasi yang telah dilakukan terhadap kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara antara lain:

1. Mendorong pemerintah desa untuk lebih memahami pentingnya keberdayaan ekonomi perdesaan melalui pengalokasian dana pengembangan perekonomian dan peningkatan kapasitas di APBDES masing-masing sesuai dengan kebutuhannya
2. Mengidentifikasi dan menentukan skala prioritas pada setiap kegiatan yang hendak dilaksanakan;
3. Pelaksanaan pembinaan yang berkesinambungan serta koordinasi yang melibatkan semua pihak baik seluruh OPD bersama perangkat-perangkat daerah sebagaimana kewenangannya masing-masing.
4. Perlu optimalisasi kegiatan evaluasi dan pengendalian secara berkala serta pengawasan yang berkesinambungan sehingga dalam pelaksanaan program/kegiatan ditahun anggaran yang akan datang ketika muncul kendala dan hambatan dapat teridentifikasi kemudian secepatnya dicarikan solusi-solusi pemecahannya. Terkait dengan capaian Desa Mandiri, diharapkan dukungan stakeholder maupun OPD lain, karena dalam pelaksanaannya terdapat indikator – indikator yang harus dipenuhi yang merupakan wewenang instansi lain.

5. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM pengelola pemberdayaan dan pemerintahan desa;
6. Konsisten berkoordinasi dan merekapitulasi pendistribusian data baik dengan pemerintah desa, kecamatan, pendamping desa dan pendamping lokal desa terhadap pemutakhiran data berkaitan dengan desa.
7. Penyusunan regulasi dan petunjuk teknis dengan lebih tepat sebagai peraturan/ perundang-undangan yang berlaku.
8. Pengajuan kesesuaian pada prioritas plafon anggaran pada kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan hasil pemetaan masalah dan kebutuhan desa sehingga dapat lebih optimal dalam peningkatan kapasitas bagi para pengelola/ perangkat pemberdayaan dan pemerintahan desa.
9. Agar dilakukan monitoring terhadap target jangka menengah yang ada dalam Renstra oleh pihak/ bagian yang diberi tanggungjawab memonitoring secara periodik/ berkala (minimal sekali 3 bulan), jadwal periodik dan mekanisme SOP agar dibuatkan dan hasil monitoring harus terdokumentasi untuk menjadikan laporan dalam laporan kinerja agar dapat ditindak lanjuti hasil monitoring tersebut.
10. Agar dilakukan monitoring terhadap rencana Aksi atas kinerja secara periodik/ berkala (minimal sekali 3 bulan) guna memantau kemajuan dari capaian target yang telah ditetapkan, hasil monitoring agar dianalisis dan dicari alternative solusinya. Juga agar dibuatkan mekanismen dan implementasi reward and punishment terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian target kinerja.

## **2) Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Capaian Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa & Kependudukan & Catatan Sipil adalah hasil kerja yang dicapai organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran, maka telah ditetapkan sasaran dan target kinerja. Sasaran dan target kinerja tersebut dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan serta aktivitas kegiatan. Berikut merupakan Rekapitulasi Evaluasi Hasil masing masing sasaran dan target kinerja yang direncanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara:

Tabel 2.1 (Tabel T-C.29)

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 Provinsi Sumatera Utara

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d dengan tahun 2023 (n-3)	Target & Realisasi Kinerja Program Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)	11=(10/4)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa, Kependudukan & Catatan Sipil										
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									
2.12.02	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Layanan Pendaftaran Penduduk	100%	99,85%	100%	96,36%	96,36%	100%	0,00%	0%
2.12.02.1.01	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	Jumlah Dokumen Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1 Dokumen	67,18%	7 Dokumen	1 Dokumen	96,36%	2 Dokumen	0 Dokumen	0%

2.12.03	Program Pencatatan Sipil	Persentase Dokumen Pencatatan Sipil	100%	99,49%	100%	99,81%	99,81%	100%	0,00%	0%
2.12.03.1.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah laporan pelayanan pencatatan sipil di Kab/Kota	1 Laporan	99,49%	5 Laporan	99,81%	99,81%	1 Laporan	0 Laporan	0%
2.12.04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Layanan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100%	75,15%	100%	97,44%	97,44%	100%	21,46%	21,46%
2.12.04.1.02	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Jumlah dokumen penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan provinsi	1 Dokumen	75,15%	2 Dokumen	2 Dokumen	97,44%	2 Dokumen	0%	0%
2.12.04.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Jumlah dokumen Pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan provinsi	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	0 Dokumen	0%
2.12.05	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase Layanan Pengelolaan Profil Kependudukan	100%	93,50%	100%	99,53%	99,53%	100%	0,00%	0%
2.12.05.1.01	Penyediaan Profil Kependudukan	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan	4 Dokumen	93,50%	3 Dokumen	1 Dokumen	99,53%	1 Laporan	0 Laporan	0%

2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & DESA									
2.13.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82 Poin	91,56%	100%	96,02%	96,02%	100%	0,00%	0%
2.13.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	100%	84,22%	30 Dokumen	9 Dokumen	99,08%	100%	0%	0%
2.13.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen keuangan	100%	92,17%	14 Bulan	14 Bulan	95%	100%	0%	0%
2.13.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen administrasi barang milik daerah	100%	-	-	-	-	100%	33%	33%
2.13.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase orang yang mengikuti sosialisasi, bimtek/ peningkatan kapasitas lainnya	100%	97,92%	100%	100%	100%	100%	4,73%	4,73%
2.13.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan operasional perkantoran	100%	98,14%	100%	99,03%	99,03%	100%	14,83%	14,83%
2.13.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Penunjang Operasional	100%	-	100%	0%	0,00%	100%	0%	0%
2.13.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang operasional kantor	100%	93,75%	100%	97,32%	97,32%	100%	14,60%	14,60%

2.13.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Aset dalam kondisi baik	100%	90,68%	100%	95,56%	95,56%	100%	10,57%	10,57%
2.13.02	Program Penataan Desa	Persentase Kab/Kota yang difasilitasi dalam penataan desa	100%	-	-	-	-	100%	14,91%	14,91%
2.13.02.1.01	Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan & Masa Jabatan Kepala Desa & Desa Adat	Jumlah penatausahaan penetapan susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan kepala desa dan desa adat sesuai aturan	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	0 Dokumen	0%
2.13.03	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Kerjasama Antar Desa	100%	93,11%	100%	97,87%	97,87%	100%	9,02%	9,02%
2.13.03.1.01	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa Yang Menjadi Kewanangan Provinsi	Jumlah fasilitasi kerjasama antar desa yang menjadi kewenangan provinsi	3 Fasilitasi	93,11%	3 Fasilitasi	3 Fasilitasi	97,87%	100%	0 Dokumen	0%
2.13.04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Administrasi Pemerintahan Desa yang Disampaikan Tepat Waktu	100%	97,54%	100%	98,53%	98,53%	100%	6,33%	6,33%

2.13.04.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa	100%	97,54%	100%	98,53%	98,53%	100%	6,33%	6,33%
2.13.05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	100%	99,27%	100%	98,87%	98,87%	100%	2,33%	2,33%
2.13.05.1.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama berada di lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penguatan dan fasilitasi penataan lembaga dan organisasi berbasis masyarakat	300 LPM Akrif	38,37%	300 LPM Aktif	98,87%	98,87%	300 LPM Aktif	0%	0%

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja di lingkungan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berupa pengkajian terhadap capaian kinerja perangkat daerah dengan target kinerja yang dibutuhkan sesuai target indikator sasaran dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja serta untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan. Untuk menganalisis kinerja atau tingkat capaian kinerja sasaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provsu, digunakan beberapa indikator kinerja antara lain :

1. Persentase Cakupan Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
  - Persentase anak (0-18 tahun) yang memiliki akta kelahiran;
  - Persentase cakupan kepemilikan akta kematian yang diterbitkan;
  - Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya tercatat;
  - Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian dari semua individu yang perceraianya tercatat;
  - Persentase penerbitan KIA dan pemanfaatan KIA dalam pelayanan Adminduk;
  - Persentase cakupan perekaman dan kepemilikan KTP-el.
2. Persentase Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Lembaga Pengguna yang menandatangani Kerjasama Pemanfaatan Data Skala Provinsi untuk Pelayanan Publik Dalam Rangka Pembangunan Desa dan Penataan Kota Berbasis NIK.
  - Penyajian Data Kependudukan Skala Provinsi;
  - Persentase Jumlah OPD Prosu dan Lembaga Pengguna Yang Menandatangani Kerjasama untuk semua urusan berbasis NIK.

Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

- 2.2.1 Persentase Penerbitan KIA dalam pelayanan Adminduk, dari hasil analisis capaian kinerja urusan Kependudukan dan Catatan Sipil bahwa, target dengan target 50% dengan realisasi sebesar 38,5% capaian sebesar 76 % Hasil capaian kinerja pada indikator tersebut termasuk dalam predikat yang Baik. Tidak tercapainya realisasi dikarenakan pada tahun 2023 kurangnya sosialisasi terkait pemanfaatan dan kegunaan KIA karena keterbatasan anggaran.
- 2.2.2 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah :
  - a Minimnya aparatur/sdm kab/kota dalam menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan sesuai standar kebutuhan suatu unit kerja;

- b Kurangnya sarana dan prasarana pelayanan adminduk di Kabupaten/Kota;
- c Belum optimalnya Perangkat Daerah Provinsi dan Lembaga Pengguna dalam hal melakukan perjanjian kerjasama dalam pemanfaatan data skala provinsi untuk pelayanan publik dalam rangka pembangunan desa dan penataan kota berbasis NIK;
- d Masih rendahnya kesadaran masyarakat arti pentingnya dokumen admin induk

Pencapaian Kinerja juga dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kunci yang telah ditentukan di lingkungan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Berikut disampaikan Rekapitulasi Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan menggunakan indikator kinerja kunci:

**Tabel 2.2 (Tabel T-C.30)**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa & Kependudukan dan Catatan Sipil**  
**Provinsi Sumatera Utara**

No	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan				0,76	0,8	0,84			0,8	0,84	
			Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital		10	15	25	7,27		15	25	
			Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak		50	55	60	46,86		55	60	

			Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan		100	100	100	100		100	100	
			Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan		96,2	97	97,8	95,49		97	97,8	
			Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan		100	100	100	100		100	100	
			Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan		100	100	100	100		100	100	
			Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan		75	75	80	70		75	80	
			Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan		100	100	100	100		100	100	

<b>2</b>	<b>Indeks Desa (ID)</b>				0,6671	0,6799	0,685			0,6799	0,685	
			Persentase Fasilitas Penataan Desa		100	100	100	100		100	100	
			Persentase Fasilitas Kerjasama Desa		100	100	100	100		100	100	
			Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya		0,0094	0,0094	0,0094			0,0094	0,0094	
			Persentase Fasilitas Tata Kelola Desa		0,0369	0,0369	0,0369			0,0369	0,0369	
			Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)		0,0243	0,0243	0,0243			0,0243	0,0243	
			Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat		0,0243	0,0243	0,0243			0,0243	0,0243	

### 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu penting adalah merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah. Perumusan isu- isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan dan hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah. Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, guna pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah sebagaimana yang dituangkan pada RPJMD, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara senantiasa dipengaruhi oleh isu-isu penting yang bersifat strategis, baik berupa kondisi, keadaan, atau peristiwa yang dampaknya dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Berdasarkan kajian hasil evaluasi penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara, khususnya pada kinerja pelayanan Administrasi Kependudukan selama ini, dapat diidentifikasi isu-isu penting sebagai berikut:

1. Belum optimalnya kuantitas dan kualitas SDM , yang memiliki kemampuan, kapasitas yang cukup dalam menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan sesuai standar kebutuhan suatu unit kerja;
2. Kurangnya sarana dan prasarana pelayanan adminduk di Kabupaten/Kota;
3. Belum optimalnya Perangkat Daerah Provinsi dan Lembaga Pengguna dalam hal melakukan perjanjian kerjasama dalam pemanfaatan data skala provinsi untuk pelayanan publik dalam rangka pembangunan desa dan penataan kota berbasis NIK;
4. Masih rendahnya kesadaran masyarakat arti dan pentingnya dokumen adminduk.

### 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 adalah **“Akselerasi Peningkatan Kualitas Pembangunan Sumatera Utara”**. Penyusunan RKPD diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan yang terencana, sistematis dan tanggap terhadap perubahan.

Penyusunan RKPD Tahun 2026 ini memerlukan review yang berdasarkan Rencana awal RKPD 2026 dengan Hasil Analisis Kebutuhan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil hal ini diperlukan untuk keselarasan antara RKPD 2026 & Renja 2026 dengan hasil analisis kebutuhan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara. Berikut terlampir tabel Review rancangan Awal RKPD tahun 2026:

**Tabel 2.3 (Tabel T-C.31)**  
**Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026**  
**Provinsi Sumatera Utara**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
2.12.02	<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>		Persentase Layanan Pendaftaran Penduduk	100%	200.000.000	<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>		Persentase Layanan Pendaftaran Penduduk	100%	702.053.422
2.12.02.1.01	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan		Jumlah Dokumen Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1 Dokumen	100.000.000	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan		Jumlah Dokumen Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1 Dokumen	300.088.022
2.12.02.1.01.0001	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional	Semua Kab/ Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional yang Ditetapkan	1 Dokumen	50.000.000	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional	Semua Kab/ Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional yang Ditetapkan	1 Dokumen	87.109.000

2.12.02.1.01.0002	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	Semua Kab/ Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah Dokumen Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	1 Dokumen	50.000.000	<b>Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi</b>	<b>Semua Kab/ Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa</b>	Jumlah Dokumen Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	1 Dokumen	212.979.022
2.12.02.1.02	<b>Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan</b>		<b>Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>100.000.000</b>	<b>Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan</b>		<b>Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>310.631.400</b>
2.12.02.1.02.0001	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Semua Kab/ Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	50.000.000	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Semua Kab/ Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	184.777.400
2.12.02.1.02.0003	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk	Semua Kab/ Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi terkait Pendaftaran Penduduk	1 Dokumen	50.000.000	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk	Semua Kab/ Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi terkait Pendaftaran Penduduk	1 Dokumen	70.450.000

2.12.02.1.02.0004						Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pendaftaran Penduduk	Semua Kab/ Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi Terkait Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	55.404.000
2.12.02.1.03						<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan</b>		<b>Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>91.334.000</b>
2.12.02.1.03.0002						Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Semua Kab/ Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	91.334.000

2.12.03	<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>		<b>Persentase Dokumen Pencatatan Sipil</b>	<b>100%</b>	<b>105.000.000</b>	<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>		Persentase Dokumen Pencatatan Sipil	100%	<b>291.874.000</b>
2.12.03.1.01	<b>Pelayanan Pencatatan Sipil</b>		<b>Jumlah laporan pelayanan pencatatan sipil di Kab/Kota</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>50.000.000</b>	<b>Pelayanan Pencatatan Sipil</b>		<b>Jumlah laporan pelayanan pencatatan sipil di Kab/Kota</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>236.874.000</b>
2.12.03.1.01.0004	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	Semua Kab/ Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	1 Laporan	50.000.000	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	Semua Kab/ Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	1 Laporan	236.874.000
2.12.03.1.02	<b>Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi</b>		<b>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>55.000.000</b>	<b>Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi</b>		<b>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>55.000.000</b>
2.12.03.1.02.0001	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Semua Kab/ Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	1 Laporan	55.000.000	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Semua Kab/ Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	1 Laporan	55.000.000

2.12.04	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>		<b>Persentase Layanan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	-	220.000.000	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>		<b>Persentase Layanan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	100%	460.000.000
2.12.04.1.01						<b>Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>		<b>Jumlah dokumen penataan pengelolaan informasi administrasi kependudukan</b>	1 Dokumen	80.000.000
2.12.04.1.01.0001						Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi	Semua Kab/ Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Dokumen	80.000.000

2.12.04.1.02	<b>Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi</b>		<b>Jumlah dokumen penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan provinsi</b>	-	60.000.000	<b>Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi</b>		Jumlah dokumen penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan provinsi	1 Dokumen	150.000.000
2.12.04.1.02.0005	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Semua Kab/ Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan	1 Dokumen	60.000.000	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Semua Kab/ Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan	1 Dokumen	150.000.000
2.12.04.1.03	<b>Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi</b>		<b>Jumlah dokumen Pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan provinsi</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>160.000.000</b>	<b>Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi</b>		Jumlah dokumen Pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan provinsi	1 Dokumen	230.000.000
2.12.04.1.03.0001	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Semua Kab/ Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	80.000.000	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	<b>Semua Kab/ Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa</b>	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	80.000.000

2.12.04.1.03.0002	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Semua Kab/ Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	1 Orang	80.000.000	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Semua Kab/ Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	66 Orang	160.000.000
<b>2.12.05</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>		<b>Persentase Layanan Pengelolaan Profil Kependudukan</b>	<b>100%</b>	<b>100.000.000</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>		<b>Persentase Layanan Pengelolaan Profil Kependudukan</b>	<b>100%</b>	<b>210.000.000</b>
<b>2.12.05.1.01</b>	<b>Penyediaan Profil Kependudukan</b>		<b>Jumlah dokumen profil kependudukan</b>	4 Dokumen	100.000.000	<b>Penyediaan Profil Kependudukan</b>		Jumlah dokumen profil kependudukan	4 Dokumen	210.000.000
2.12.05.1.01.0001	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	Semua Kab/ Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah Dokumen data kependudukan Provinsi yang tersedia	2 Dokumen	50.000.000	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	Semua Kab/ Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah Dokumen data kependudukan Provinsi yang tersedia	2 Dokumen	130.000.000

2.12.05.1.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Semua Kab/ Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain yang tersusun	1 Dokumen	50.000.000	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Semua Kab/ Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain yang tersusun	2 Dokumen	80.000.000
2.13.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>		<b>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</b>	<b>82 Poin</b>	<b>22.602.791.761</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>		<b>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</b>	<b>82 Poin</b>	<b>24.883.633.185</b>
2.13.01.1.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>Presentase Ketersedian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi</b>	<b>100%</b>	<b>740.000.000</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>Presentase Ketersedian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi</b>	<b>100%</b>	<b>914.493.950</b>
2.13.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kab/ Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	440.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kab/ Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	596.443.950
2.13.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi Sumatera Utara, Semua Kab/ Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	300.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/ Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	318.050.000

2.13.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan dokumen keuangan	100%	14.244.000.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan dokumen keuangan	100%	14.244.000.000
2.13.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Provinsi Sumatera Utara, Semua Kab/ Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	130 Orang/ Bulan	14.164.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Provinsi Sumatera Utara, Semua Kab/ Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	130 Orang/ Bulan	14.164.000.000
2.13.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Semua Kab/ Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	6 Laporan	80.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	80.000.000
2.13.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan dokumen administrasi barang milik daerah	100%	80.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan dokumen administrasi barang milik daerah	100%	80.000.000

2.13.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Semua Kab/ Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	80.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Semua Kab/ Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	80.000.000
2.13.01.1.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase orang yang mengikuti sosialisasi, bimtek/peningkatan kapasitas lainnya</b>	<b>100%</b>	<b>800.000.000</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase orang yang mengikuti sosialisasi, bimtek/peningkatan kapasitas lainnya</b>	<b>100%</b>	<b>974.585.000</b>
2.13.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Semua Kab/ Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	130 Orang	800.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Semua Kab/ Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	130 Orang	974.585.000
2.13.01.1.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase ketersediaan operasional perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>1.260.000.000</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase ketersediaan operasional perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>1.583.037.048</b>

2.13.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Provinsi Sumatera Utara, Semua Kab/ Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	350.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kab/ Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	422.726.730
2.13.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Semua Kab/ Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	90.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Semua Kab/ Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	89.020.318
2.13.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Semua Kab/ Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	180.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Semua Kab/ Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	233.200.000
2.13.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Provinsi Sumatera Utara, Semua Kab/ Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	240.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Semua Kab/ Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Paket	240.000.000
2.13.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi Sumatera Utara, Semua Kab/ Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	400.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kab/ Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	598.090.000

2.13.1.1.07						<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		Persentase Ketersediaan Barang Penunjang Operasional	100%	375.589.768
2.13.1.1.07.0006						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Provinsi Sumatera Utara, Semua Kab/ Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	291.222.168
2.13.1.1.07.010						Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Provinsi Sumatera Utara, Semua Kab/ Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	84.367.600
2.13.01.1.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase ketersediaan jasa penunjang operasional kantor</b>	<b>100%</b>	<b>4.568.791.761</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase ketersediaan jasa penunjang operasional kantor</b>	<b>100%</b>	<b>5.159.626.173</b>
2.13.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Provinsi Sumatera Utara, Semua Kab/ Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	200.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Provinsi Sumatera Utara, Semua Kab/ Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	202.520.000

2.13.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Provinsi Sumatera Utara, Semua Kab/ Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	760.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Provinsi Sumatera Utara, Semua Kab/ Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	945.735.373
2.13.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kab/ Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	308.791.761	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kab/ Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	711.370.800
2.13.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Semua Kab/ Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	3.300.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Semua Kab/ Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	3.300.000.000
2.13.01.1.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase Aset dalam kondisi baik</b>	<b>100%</b>	<b>910.000.000</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase Aset dalam kondisi baik</b>	<b>100%</b>	<b>1.552.301.246</b>
2.13.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Semua Kab/ Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	34 Unit	710.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Semua Kab/ Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	34 Unit	955.323.450

2.13.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kab/ Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	200.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kab/ Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	300.000.000
2.13.01.1.09.0010						Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kab/ Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	2 Unit	296.977.796
2.13.02	<b>PROGRAM PENATAAN DESA</b>		<b>Persentase Kab/Kota yang difasilitasi dalam penataan desa</b>	<b>100%</b>	<b>121.260.000</b>	<b>PROGRAM PENATAAN DESA</b>		<b>Persentase Kab/Kota yang difasilitasi dalam penataan desa</b>	<b>100%</b>	<b>250.000.000</b>
2.13.02.1.01	<b>Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat</b>		<b>Jumlah penatausahaan penetapan susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan kepala desa dan desa adat sesuai aturan</b>	1 Dokumen	121.260.000	<b>Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat</b>		Jumlah penatausahaan penetapan susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan kepala desa dan desa adat sesuai aturan	1 Dokumen	250.000.000

2.13.02.1.01.0003	Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	Semua Kab/ Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	1 Dokumen	121.260.000	Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	Semua Kab/ Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	1 Dokumen	250.000.000
2.13.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA</b>		<b>Persentase Kerjasama Antar Desa</b>	<b>100%</b>	<b>203.000.000</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA</b>		<b>Persentase Kerjasama Antar Desa</b>	<b>100%</b>	<b>408.036.900</b>
2.13.03.1.01	<b>Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi</b>		Jumlah fasilitasi kerjasama antar desa yang menjadi kewenangan provinsi	3 Fasilitasi	203.000.000	<b>Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi</b>		Jumlah fasilitasi kerjasama antar desa yang menjadi kewenangan provinsi	3 Fasilitasi	408.036.900
2.13.03.1.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Semua Kab/ Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dokumen	203.000.000	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Semua Kab/ Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	3 Dokumen	408.036.900
2.13.04	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>		<b>Persentase Administrasi Pemerintahan Desa yang Disampaikan Tepat Waktu</b>	<b>100%</b>	<b>973.740.000</b>	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>		<b>Persentase Administrasi Pemerintahan Desa yang Disampaikan Tepat Waktu</b>	<b>100%</b>	<b>3.165.062.590</b>
2.13.04.1.01	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>		<b>Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa</b>	<b>100%</b>	<b>973.740.000</b>	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>		Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa	100%	3.165.062.590

2.13.04.1.01.0008	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Semua Kab/ Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	460.057.100	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Semua Kab/ Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	2 Dokumen	1.100.000.000
2.13.04.1.01.0009	Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	Semua Kab/ Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	70.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	Semua Kab/ Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	370.000.000
2.13.04.1.01.0010	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	Semua Kab/ Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina	200 Orang	121.260.000	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	Semua Kab/ Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina	200 Orang	350.000.000
2.13.04.1.01.0015	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Semua Kab/ Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 Dokumen	285.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Semua Kab/ Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	3 Dokumen	1.115.062.590
2.13.04.1.01.0016	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Semua Kab/ Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1 Dokumen	37.422.900	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Semua Kab/ Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1 Dokumen	230.000.000

2.13.05	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>		<b>Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat</b>	100%	2.999.000.000	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>		<b>Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat</b>	100%	9.369.482.590
2.13.05.1.01	<b>Pemberdayaan Lembaga ke Masyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Terlaksananya penguatan dan fasilitasi penataan lembaga dan organisasi berbasis masyarakat</b>	300 LPM Aktif	2.999.000.000	<b>Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Terlaksananya penguatan dan fasilitasi penataan lembaga dan organisasi berbasis masyarakat</b>	300 LPM Aktif	9.369.482.590

2.13.05.1.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Semua Kab/ Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	163.000.000	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Semua Kab/ Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	744.136.000
2.13.05.1.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Semua Kab/ Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya	100 Lembaga	170.000.000	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Semua Kab/ Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang meningkat kapasitas	150 Lembaga	415.512.700

2.13.05.1.01.0004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Semua Kab/ Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	10 Unit	180.000.000	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Semua Kab/ Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	20 Unit	520.857.000
2.13.05.1.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Semua Kab/ Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	50.000.000	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Semua Kab/ Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	2 Laporan	78.062.000
2.13.05.1.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Semua Kab/ Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Laporan	2.436.000.000	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Semua Kab/ Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	4 Laporan	7.610.914.890

Berdasarkan tabel Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026, hasil review untuk program sudah sesuai untuk rencanan dan hasil analisis kebutuhan yaitu 9 program. Kegiatan yang direncanakan adalah 18 kegiatan, berbeda dengan hasil analisis yang membutuhkan 21 kegiatan, dan untuk sub kegiatan jumlah sub kegiatan pada rancangan awal RKPD 20226 adalah 40 sub kegiatan dengan hasil analisis adalah 46 sub kegiatan. Hasil evaluasi untuk kebutuhan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil adalah diperlukannya tambahan pagu dan sub kegiatan untuk meningkatkan kinerja di lingkungan perangkat daerah.

## **2.5 Penelaahan Usulan Program & Kegiatan Masyarakat**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil dalam mendukung program astacita ke 6, yaitu membangun desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemertaan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan) dan dalam rangka mewujudkan visi Kolaborasi Sumut Berkah menuju Sumut yang Unggul maju dan berkelanjutan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil mendukung misi ke 2 (untuk urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, serta misi ke 3 (untuk urusan kependudukan dan catatan sipil). Pemberdayaan Masyarakat Desa & Kependudukan dan Catatan Sipil memiliki tujuan Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Stabil dan Inklusif dan Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif, serta memiliki sasaran Meningkatkan daya saing daerah dan Meningkatkan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel.

Strategi yang dimiliki adalah Pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dalam Pemberdayaan masyarakat desa di Sumatera Utara dan Pengembangan Kerjasama pemanfaatan data di lingkungan OPD Provsu dan Lembaga Pengguna untuk layanan publik berbasis NIK serta koordinasi dengan pusat, kabupaten/kota, terkait data kependudukan secara akurat dan terpadu. Untuk mendukung Strategi tersebut diperlukan Program yang mendukung strategi tersebut. Berikut disampaikan Usulan Program dan Kegiatan yang melibatkan masyarakat dari Pemangku Kepentingan Tahun Provinsi Sumatera Utara.

**Tabel 2.4 (Tabel T-C.32)**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Provinsi Sumatera utara**

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pemberdayaan Desa & Kependudukan dan Catatan Sipil

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<b>Program Membangun Desa Produktif Terpadu</b>				
	Lomba inovasi pengembangan desa berbasis potensi seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata melalui kegiatan Penilaian Lomba BUMDes di Sumatera Utara, mencakup 27 kabupaten/kota.	27 Kab/Kota	Jumlah BUMDes Berinovasi berbasis Potensi	6 pemenang BUMDES	
	Lomba Desa dan Kelurahan terbaik tingkat Provinsi Sumatera utara (pembinaan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa/kelurahan)	33 Kab/Kota	Jumlah Desa & Kelurahan	3 Desa dan 3 Kelurahan terbaik	
	Pengembangan usaha BUMDes melalui pendampingan dan kerjasama dengan pihak ketiga	Tapteng, Taput, Nias, Simalungun, Asahan, Dairi, Mandailing Natal, Pakpak Bharat, Humbang Hasundutan, Samosir, Paluta, Palas, Labura, Gunungsitoli, dan Padangsidimpuan.	Jumlah BUMDes yang mendapat pendampingan dan kerjasama	90 BUMDES/bumdesma	
	Peningkatan Produk Unggulan Desa melalui pendampingan	Tapteng, Taput, Nias, Simalungun, Asahan, Dairi, Mandailing Natal, Pakpak Bharat,	Jumlah BUMDes yang Produk Unggulannya meningkat	20 BUMDes	

	Memfasilitasi akses kerja sama dengan multipihak melalui CSR untuk peningkatan desa produktif terpadu khususnya desa pertanian dan pariwisata	20 kabupaten/kota seperti Tapteng, Taput, Nias, Simalungun, Asahan, Dairi, Mandailing Natal, Pakpak Bharat, Humbang Hasundutan, Samosir, Paluta, Palas, Labura, Gunungsitoli, dan Padangsidimpuan.	Jumlah kerjasama dengan CSR	20 kerjasama dengan CSR lokasi pertanian dan wisata	
	Pemberian bantuan peralatan pengolahan hasil produksi kopi, gula aren	Kabupaten Madina, Kabupaten Karo	Jumlah kawasan yang mendapat pemberian hibah untuk peralatan pengolahan hasil produksi kopi, gula, aren	2 kawasan pemberian hibah barang	

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Pemerintah telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029. Di dalam RPJMN Tahun 2025-2029 dirumuskan upaya-upaya transformatif sesuai dengan fokus arah kebijakan dalam Tahap I RPJPN Tahun 2025-2045, Sejumlah transformasi dalam tahap pertama ini mencakup transformasi sosial; ekonomi; tata kelola; supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia; ketahanan sosial budaya dan ekologi; pembangunan wilayah dan sarana prasarana; serta **kesinambungan pembangunan.**

Di dalam RPJMN ini dituangkan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan visi Presiden periode 2025-2029, yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Langkah-langkah tersebut dikelompokkan ke dalam delapan prioritas nasional pembangunan jangka menengah, yang merupakan implementasi langsung dari delapan misi Presiden atau Asta Cita. Berikut delapan prioritas nasional tersebut:

1. memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan

8. memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Berdasarkan penelaahan terhadap prioritas Nasional, Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mendukung Prioritas Nasional 4 dan 8, urusan Kependudukan dan Catatan Sipil mendukung Prioritas Nasional 4. Hal ini selaras dengan 8 Program hasil terbaik cepat Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara serta 17 Program Prioritas Provinsi Sumatera Utara.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai.

Sasaran adalah target atau hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Tujuan pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2029-2030 merupakan sebuah kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan selama periode pembangunan tahun 2025-2029 yang akan diwujudkan melalui pencapaian sasaran pembangunan daerah. Sebagai dampak dari tidak adanya visi dan misi kepala daerah terpilih sebagai dasar penyusunan RPD Tahun 2025-2029, maka perumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2025- 2029 dilakukan berdasarkan isu strategis daerah aktual yang telah dirumuskan sebelumnya dengan menggunakan penyelarasan serta analisis SWOT, ditetapkan tujuan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara tahun 2025-2029 sebagai berikut :

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi dalam menentukan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara erat kaitannya terhadap Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan sesuai RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Utara merupakan proses memutuskan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program-program yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah serta perkiraan jumlah sumber daya yang akan dialokasikan ke setiap program jangka menengah dalam sisa periode renstra selama 1 (satu) tahun ke depan. Penetapan tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara

didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Succes Factor*) dalam rangka mewujudkan Tujuan dan Sasaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara tahun 2026 adalah sejalan dengan tujuan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026. Tujuan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara yang ingin dicapai untuk 1 (satu) tahun kedepan adalah : **“Kolaborasi SUMUT Berkah menuju Sumatera Utara yang Unggul, Maju dan Berkelanjutan”**, pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3.1**  
**Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara 2024 - 2030**

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG STABIL DAN INKLUSIF SERTA MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERKUALITAS DAN INOVATIF	Meningkatnya Daya Saing Daerah	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	17,18%	20,64%	26,17%	35,46%	54,94%	100%
			Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	15,24%	16,41%	17,71%	19,17%	20,81%	22,67%
			Persentase Desa Mandiri	5,87%	8,64%	11,41%	14,18%	16,95%	19,72%
		Meningkatnya Birokrasi yang Berintegritas dan Adaptif	Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam satu tahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Pemanfaatan data kependudukan	19%	26%	32%	39%	45%	52%
			Persentase Kepemilikan dokumen kependudukan di Provinsi Sumatera Utara (KTP EL, IKD, AKTE KELAHURAN, BUKU POKOK PEMAAMAN)	62,99%	65,46%	67,20%	70,04%	72,44%	74,92%

### 3.3 Program & Kegiatan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil dalam upaya meningkatkan dan menciptakan Kinerja yang lebih efektif, optimal dan mencapai sasaran, maka disusun Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil tahun 2026. Renja tahun 2026 merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran DPMD DUKCAPIL (RKA DPMD DUKCAPIL) Tahun 2026.

Di dalam Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 yang telah disusun dan dibahas dalam Forum Organisasi Perangkat Daerah dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Provinsi Sumatera Utara memuat 9 program yang terurai dalam tabel dan akan dilaksanakan oleh DPMD DUKCAPIL Provinsi Sumatera Utara pada 1 (satu) tahun ke depan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 13,846,172,717,- berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 (RKPD Provinsi Sumatera Utara tahun 2026). Untuk itu seluruh program pembangunan yang akan dilaksanakan dalam rangka menyelesaikan permasalahan pembangunan yang terjadi di Kabupaten Mojokerto yang menjadi ruang lingkup DPMD dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil memiliki program dan kegiatan yang direncanakan untuk Tahun 2026, berikut adalah Program untuk Renja tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Program Pendaftaran Penduduk
2. Program Pencatatan Sipil
3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
4. Program Pengelolaan Profil Kependudukan
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
6. Program Penataan Desa
7. Program Peningkatan Kerja Sama Desa
8. Program Administrasi Pemerintahan Desa
9. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Program-program tersebut memiliki kegiatan, sub kegiatan dan pagu anggaran. Berikut dilampirkan penjelasan dalam tabel untuk program, kegiatan dan sub kegiatan untuk rencana tahun 2026 dan perkiraan maju tahun 2027:

Tabel 3.2 (Tabel T-C.33)

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Provinsi Sumatera Utara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	<b>DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL</b>					<b>39.360.142.687</b>			<b>39.759.115.851</b>
2	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>				<b>39.360.142.687</b>				<b>39.679.115.851</b>
2.12	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>				<b>1.283.927.422</b>				<b>1.371.674.000</b>
2.12.02	<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	<b>Persentase Layanan Pendaftaran Penduduk</b>		<b>100%</b>	<b>702.053.422</b>			<b>100%</b>	<b>775.800.000</b>

<b>2.12.02.1.01</b>	<b>Pelayanan Pendaftaran Kependudukan</b>	<b>Jumlah Dokumen Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>		<b>1 Dokumen</b>	<b>300.088.022</b>			<b>1 Dokumen</b>	<b>340.000.000</b>
2.12.02.1.01.0001	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional yang Ditetapkan	Semua Kab/ Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	1 Dokumen	87.109.000	DANA BAGI HASIL (DBH)		1 Dokumen	90.000.000
2.12.02.1.01.0002	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	Jumlah Dokumen Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	Semua Kab/ Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	1 Dokumen	212.979.022	DANA BAGI HASIL (DBH)		1 Dokumen	250.000.000
<b>2.12.02.1.02</b>	<b>Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan</b>	<b>Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan</b>		<b>1 Dokumen</b>	<b>310.631.400</b>			<b>1 Dokumen</b>	<b>340.800.000</b>
2.12.02.1.02.0001	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Semua Kab/ Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	1 Laporan	184.777.400	DANA BAGI HASIL (DBH)		1 Laporan	200.800.000

2.12.02.1.02.0003	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi terkait Pendaftaran Penduduk	Semua Kab/ Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	1 Dokumen	70.450.000	DANA BAGI HASIL (DBH)		1 Dokumen	75.000.000
2.12.02.1.02.0004	Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pendaftaran Penduduk	Semua Kab/ Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	1 Laporan	55.404.000	DANA BAGI HASIL (DBH)		1 Laporan	65.000.000
<b>2.12.02.1.03</b>	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan</b>	<b>Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan</b>		1 Dokumen	91.334.000			100%	95.000.000
2.12.02.1.03.0002	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Semua Kab/ Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	1 Laporan	91.334.000	DANA BAGI HASIL (DBH)			95.000.000
<b>2.12.03</b>	<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>	<b>Persentase Dokumen Pencatatan Sipil</b>		<b>100%</b>	<b>291.874.000</b>			<b>100%</b>	<b>300.874.000</b>

<b>2.12.03.1.01</b>	<b>Pelayanan Pencatatan Sipil</b>	<b>Jumlah laporan pelayanan pencatatan sipil di Kab/Kota</b>		1 Laporan	291.874.000			1 Laporan	300.874.000
2.12.03.1.01.0004	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	Semua Kab/ Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	1 Laporan	236.874.000	DANA BAGI HASIL (DBH)		1 Laporan	300.874.000
<b>2.12.03.1.02</b>	<b>Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi</b>	<b>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>		1 Laporan	55.000.000,00			1 Laporan	65.000.000
2.12.03.1.02.0001	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	Semua Kab/ Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	1 Laporan	55.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)		1 Laporan	65.000.000
<b>2.12.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	<b>Persentase Layanan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>		<b>100%</b>	<b>80.000.000</b>			<b>100%</b>	<b>85.000.000</b>
2.12.04.1.01	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah dokumen penataan pengelolaan informasi administrasi kependudukan		1 Dokumen	80.000.000			1 Dokumen	85.000.000

2.12.04.1.01.0001	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Semua Kab/ Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	1 Dokumen	80.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)		1 Dokumen	85.000.000
2.12.04.1.02	<b>Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi</b>	<b>Jumlah dokumen penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan provinsi</b>		1 Dokumen	150.000.000			100%	175.000.000
2.12.04.1.02.0005	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan	Semua Kab/ Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	1 Dokumen	150.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)		1 Dokumen	175.000.000
2.12.04.1.03	<b>Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi</b>	<b>Jumlah dokumen Pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan provinsi</b>		1 Dokumen	230.000.000			1 Dokumen	265.000.000

2.12.04.1.03.0001	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Semua Kab/ Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	1 Laporan	80.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)		1 Laporan	90.000.000
2.12.04.1.03.0002	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Semua Kab/ Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	66 Orang	160.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)		66 Orang	175.000.000
<b>2.12.05</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>	<b>Persentase Layanan Pengelolaan Profil Kependudukan</b>		100%	210.000.000			100%	210.000.000
<b>2.12.05.1.01</b>	<b>Penyediaan Profil Kependudukan</b>	<b>Jumlah Dokumen Profil Kependudukan</b>		4 Dokumen	210.000.000			4 Dokumen	210.000.000
2.12.05.1.01.0001	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	Jumlah Dokumen data kependudukan Provinsi yang tersedia	Semua Kab/ Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	2 Dokumen	130.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)		2 Dokumen	130.000.000

2.12.05.1.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain yang tersusun	Semua Kab/ Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	2 Dokumen	80.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)		2 Dokumen	80.000.000
<b>2.13</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT &amp; DESA</b>				<b>38.076.215.265</b>				<b>38.307.441.851</b>
<b>2.13.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</b>		<b>82 Poin</b>	<b>24.883.633.185</b>			<b>82 Poin</b>	<b>25.042.896.671</b>
<b>2.13.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Presentase Ketersedian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi</b>		<b>100%</b>	<b>914.493.950</b>			<b>100%</b>	<b>960.000.000</b>
2.13.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kab/ Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	10 Dokumen	596.443.950	DANA BAGI HASIL (DBH)		10 Dokumen	610.000.000

2.13.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/ Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	2 Laporan	318.050.000	DANA BAGI HASIL (DBH)		2 Laporan	350.000.000
<b>2.13.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase ketersediaan dokumen keuangan</b>		100%	14.244.000.000			100%	14.285.000.000
2.13.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kab/ Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	130 Orang/ Bulan	14.164.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		130 Orang/ Bulan	14.200.000.000
2.13.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Semua Kab/ Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	1 Laporan	80,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	85.000.000
<b>2.13.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase ketersediaan dokumen administrasi barang milik daerah</b>		100%	80.000.000			100%	90.000.000

2.13.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Semua Kab/ Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	1 Laporan	80.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)		1 Laporan	90.000.000
<b>2.13.01.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase orang yang mengikuti sosialisasi, bimtek/ peningkatan kapasitas lainnya</b>		100%	974.585.000			100%	980.000.000
2.13.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Semua Kab/ Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	130 Orang	974.585.000	DANA BAGI HASIL (DBH)		130 Orang	980.000.000
<b>2.13.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase ketersediaan operasional perkantoran</b>		100%	1.583.037.048			100%	1.605.947.048
2.13.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Semua Kab/ Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	3 Paket	422.726.730	DANA BAGI HASIL (DBH)		3 Paket	430.726.730

2.13.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Semua Kab/ Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	1 Paket	89.020.318	DANA BAGI HASIL (DBH)		1 Paket	90.020.318
2.13.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Semua Kab/ Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	3 Paket	233.200.000	DANA BAGI HASIL (DBH)		3 Paket	240.200.000
2.13.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kab/ Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	3 Paket	240.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)		3 Paket	245.000.000
2.13.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kab/ Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	10 Laporan	598.090.000	DANA BAGI HASIL (DBH)		10 Laporan	600.000.000
2.13.1.1.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Ketersediaan Barang Penunjang Operasional</b>		100%	375.589.768			100%	380.000.000

2.13.1.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Provinsi Sumatera Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	2 Unit	291.222.168	DANA BAGI HASIL (DBH)		2 Unit	295.000.000
2.13.1.1.07.010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Provinsi Sumatera Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	4 Unit	84.367.600	DANA BAGI HASIL (DBH)		4 Unit	85.000.000
<b>2.13.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase ketersediaan jasa penunjang operasional kantor</b>		100%	5.159.626.173			100%	5.268.626.173
2.13.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Provinsi Sumatera Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	1 Laporan	202.520.000	DANA BAGI HASIL (DBH)		1 Laporan	202.520.000

2.13.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi Sumatera Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	1 Laporan	945.735.373	DANA BAGI HASIL (DBH)		1 Laporan	950.735.373
2.13.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Semua Kab/ Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	1 Laporan	711.370.800	DANA BAGI HASIL (DBH)		1 Laporan	715.370.800
2.13.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Semua Kab/ Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	2 Laporan	3.300.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)		2 Laporan	3.400.000.000
<b>2.13.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Aset dalam kondisi baik</b>		100%	1.552.301.246			100%	1.563.323.450
2.13.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Semua Kab/ Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	34 Unit	955.323.450	DANA BAGI HASIL (DBH)		34 Unit	960.323.450

2.13.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Semua Kab/ Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	20 Unit	300.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)		20 Unit	305.000.000
2.13.01.1.09.0010	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Semua Kab/ Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	2 Unit	296.977.796	DANA BAGI HASIL (DBH)		2 Unit	298.000.000
<b>2.13.02</b>	<b>PROGRAM PENATAAN DESA</b>	<b>Persentase Kab/Kota yang difasilitasi dalam penataan desa</b>		<b>100%</b>	<b>250.000.000</b>			<b>100%</b>	<b>260.000.000</b>
2.13.02.1.01	Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	Jumlah penatausahaan penetapan susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan kepala desa dan desa adat sesuai aturan		1 Dokumen	250.000.000			1 Dokumen	260.000.000
2.13.02.1.01.0003	Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	Semua Kab/ Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	1 Dokumen	250.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)		1 Dokumen	255.000.000

2.13.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA</b>	<b>Persentase Kerjasama Antar Desa</b>		<b>100%</b>	<b>408.036.900</b>			<b>100%</b>	<b>410.000.000</b>
2.13.03.1.01	<b>Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi</b>	<b>Jumlah fasilitasi kerjasama antar desa yang menjadi kewenangan provinsi</b>		3 Fasilitasi	408.036.900			3 Fasilitasi	410.000.000
2.13.03.1.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Semua Kab/ Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	3 Dokumen	408.036.900	DANA BAGI HASIL (DBH)		3 Dokumen	410.000.000
2.13.04	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase Administrasi Pemerintahan Desa yang Disampaikan Tepat Waktu</b>		<b>100%</b>	<b>3.165.062.590</b>			<b>100%</b>	<b>3.225.062.590</b>
2.13.04.1.01	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>	<b>Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa</b>		100%	3.165.062.590			100%	3.225.062.590
2.13.04.1.01.0008	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Semua Kab/ Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	2 Dokumen	1.100.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)		2 Dokumen	1.150.000.000

2.13.04.1.01.0009	Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	Semua Kab/ Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	1 Dokumen	370.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)		1 Dokumen	375.000.000
2.13.04.1.01.0010	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina	Semua Kab/ Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	200 Orang	350.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)		200 Orang	350.000.000
2.13.04.1.01.0015	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Semua Kab/ Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	3 Dokumen	1.115.062.590	DANA BAGI HASIL (DBH)		3 Dokumen	1.115.062.590
2.13.04.1.01.0016	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Semua Kab/ Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	1 Dokumen	230.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)		1 Dokumen	235.000.000

2.13.05	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>	<b>Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat</b>		<b>100%</b>	<b>9.369.482.590</b>			<b>100%</b>	<b>9.369.482.590</b>
2.13.05.1.01	<b>Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Terlaksananya penguatan dan fasilitasi penataan lembaga dan organisasi berbasis masyarakat</b>		300 LPM Aktif	9.369.482.590			300 LPM Aktif	9.369.482.590
2.13.05.1.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Semua Kab/ Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	2 Dokumen	744.136.000	DANA BAGI HASIL (DBH)		2 Dokumen	744.136.000

2.13.05.1.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang meningkat kapasitas	Semua Kab/ Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	150 Lembaga	415.512.700	DANA BAGI HASIL (DBH)		150 Lembaga	415.512.700
2.13.05.1.01.0004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Semua Kab/ Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	20 Unit	520.857.000	DANA BAGI HASIL (DBH)		20 Unit	520.857.000
2.13.05.1.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Semua Kab/ Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	2 Laporan	78.062.000	DANA BAGI HASIL (DBH)		2 Laporan	78.062.000

2.13.05.1.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Semua Kab/ Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	4 Laporan	7.610.914.890	DANA BAGI HASIL (DBH)		4 Laporan	7.610.914.890
-------------------	---	--	--	-----------	---------------	-----------------------	--	-----------	---------------

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2026 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara untuk mendukung tujuan pembangunan daerah, maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

#### **4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan**

Rencana kerja dan pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2025-2029, serta mendukung tujuan dan sasaran Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026

Pada RKPD Provsu tahun 2026 ada beberapa program dan kegiatan prioritas dari kegiatan terintegrasi yang akan dilaksanakan secara terintegrasi dengan harapan agar terciptanya sinkronisasi perencanaan pembangunan antar sektor, antar wilayah dan antar berbagai pihak yang berkepentingan dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan. Sebagaimana tercantum RKPD Provsu tahun 2026, kegiatan prioritas Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provsu sebagai urusan bidang administrasi kependudukan dan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan provinsi.

Rincian rencana kerja dan rencana pendanaan tahun 2026 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara sebagaimana terlampir.

**Tabel 4.1**  
**Sasaran dan target Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara 2026**

Sasaran	Indikator	Target Kinerja Tahun 2026
3	4	6
Meningkatnya Daya Saing Daerah	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	20,64%
	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	16,41%
	Persentase Desa Mandiri	8,64%
Meningkatnya Birokrasi yang Berintegritas dan Adaptif	Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam satu tahun	100%
	Persentase Pemanfaatan data kependudukan	26%
	Persentase Kepemilikan dokumen kependudukan di Provinsi Sumatera Utara (KTP EL, IKD, AKTE KELAHURAN, BUKU POKOK PEMAKAMAN)	65,46%

**Tabel 4.2**  
**Tabel Program dan Kegiatan yang dikaitkan dengan Pendanaan Tahun 2026**

PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN
<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	<b>Persentase Layanan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>100 Persen</b>	<b>200,000,000</b>
<b>Pelayanan Pendaftaran Kependudukan</b>	Jumlah Dokumen Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1 Dokumen	100,000,000
Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional yang Ditetapkan	1 Dokumen	50.000.000
Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	Jumlah Dokumen Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	1 Dokumen	500,000,000
<b>Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan</b>	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	100 % 1 Dokumen	420,000,000
Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	50.000.000

PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN
Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi terkait Pendaftaran Penduduk	1 Dokumen	50.000.000
<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>	<b>Persentase Dokumen Pencatatan Sipil</b>	<b>100 Persen</b>	<b>220,000,000</b>
<b>Pelayanan Pencatatan Sipil</b>	Jumlah laporan pelayanan pencatatan sipil di Kab/Kota	1 Laporan	105,000,000
Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	1 Laporan	50.000.000
Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	1 Laporan	55.000.000
<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	<b>Persentase Layanan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>100 Persen</b>	<b>790,000,000</b>
<b>Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi</b>	Jumlah dokumen penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan provinsi	100 %	60,000,000
<b>Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi</b>	Jumlah dokumen Pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan provinsi	1 Dokumen	160,000,000
Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	80,000,000
Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	66 Orang	80,000,000
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>	<b>Persentase Layanan Pengelolaan Profil Kependudukan</b>	<b>100 Persen</b>	<b>210,000,000</b>

PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN
<b>Penyediaan Profil Kependudukan</b>	Jumlah dokumen profil kependudukan	4 Dokumen	100,000,000
Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	Jumlah Dokumen data kependudukan Provinsi yang tersedia	1 Dokumen	50,000,000
Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain yang tersusun	1 Dokumen	50,000,000
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</b>	<b>82 Poin</b>	<b>24,431,416,897</b>
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Presentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	100 Persen	440,000,000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	440,000,000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	300,000,000
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase ketersediaan dokumen keuangan	100 Persen	14.244.000.000
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	130 Orang/ Bulan	14.164.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	80,000,000
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Persentase ketersediaan dokumen administrasi barang milik daerah	100 Persen	80,000,000
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	80,000,000
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase orang yang mengikuti sosialisasi, bimtek/peningkatan kapasitas lainnya	100 Persen	800,000,000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	150 Orang	800,000,000
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase ketersediaan operasional perkantoran	100 Persen	2,208,992,203

PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	350.000.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	90,000,000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	180.000.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	240.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	400.000.000
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase ketersediaan barang penunjang operasional	100 Persen	460,000,000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	200,000,000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	260,000,000
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase ketersediaan jasa penunjang operasional kantor	100 Persen	4.568.791.761
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	200.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	760.000.000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	308.791.761
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	3,300,000,000
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Aset dalam kondisi baik	100 Persen	910.000.000

PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	34 Unit	710.000.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	200.000.000
<b>PROGRAM PENATAAN DESA</b>	<b>Persentase Kab/Kota yang difasilitasi dalam penataan desa</b>	<b>100 Persen</b>	<b>121.260.000</b>
<b>Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat</b>	Jumlah penatausahaan penetapan susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan kepala desa dan desa adat sesuai aturan	1 Dokumen	121.260.000
Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	1 Dokumen	121.260.000
<b>PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA</b>	<b>Persentase Kerjasama Antar Desa</b>	<b>100 Persen</b>	<b>203.000.000</b>
<b>Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi</b>	Jumlah fasilitasi kerjasama antar desa yang menjadi kewenangan provinsi	1 Fasilitasi	203.000.000
Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dokumen	203.000.000
<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase Administrasi Pemerintahan Desa yang Disampaikan Tepat Waktu</b>	<b>100 Persen</b>	<b>973.740.000</b>
<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>	Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa	100 %	973.740.000
Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	2 Dokumen	460.057.100
Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	70.000.000

PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN
Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina	200 Orang	121.260.000
Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 Dokumen	285.000.000
Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1 Dokumen	37.422.900
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>	<b>Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat</b>	<b>100 Persen</b>	<b>2.999.000.000</b>
<b>Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>	Terlaksananya penguatan dan fasilitasi penataan lembaga dan organisasi berbasis masyarakat	300 LPM Aktif	2.999.000.000
Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	163.000.000
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya	100 Lembaga	170.000.000
Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1Kegiatan	180.000.000

<b>PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>TARGET</b>	<b>ANGGARAN</b>
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	50.000.000
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Laporan	2.436.000.000

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rancangan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) merupakan suatu dokumen perencanaan resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan OPD khususnya dan Pembangunan Tahunan Daerah pada umumnya. Renja OPD mempunyai fungsi penting dan sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena Renja OPD adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di Pemerintah Daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan di tingkat yang lebih atas seperti RKPD, Renstra/P.Renstra OPD, RPJMD/P.RPJMD dan bahkan RPJPD. Renja OPD berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah daerah.

Rencana Kerja sangat penting artinya sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak pelaku pembangunan (stakeholders) dalam menciptakan *Good Governance*, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya berpengaruh ke bawah sehingga keberpihakan pada masyarakat benar-benar dikedepankan.

Penyusunan rancangan Renja tahun 2026 ini didasarkan pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Utara tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis 2025-2029. Dalam rancangan renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara tahun 2026 ini juga telah ditetapkan target-target kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu pelaksanaan tugas 1 (satu) tahun. Untuk itu diharapkan rancangan renja ini dapat dijadikan sebagai prioritas dalam upaya menciptakan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan terselenggaranya penegakan perda, perkara serta perlindungan masyarakat.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Renja 2026 maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mensosialisasikan renja ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi.
2. Pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dirumuskan tidak menyimpang dari renja.
3. Pengukuran Pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam renja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan renja yang telah dibuat.

Demikian Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 ini dibuat untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun dan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara semoga rencana tahun 2026 yang telah dibuat dapat diwujudkan demi tercapainya tujuan akhir bersama.

**KEPALA DINAS  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,  
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL  
PROVINSI SUMATERA UTARA**



*[Handwritten signature]*

**M. PARLINDUNGAN PANE, SH, M.Si  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19701011 199803 1 002**

